

DAMPAK PEMBANGUNAN SOUTHEASTERN ANATOLIA (GAP) TERHADAP PENURUNAN DEBIT AIR SUNGAI EUFRAT DI SURIAH DAN IRAK

Elisa Putri Anggraeni¹, Romdon Abdul Japar², Fadlan Ismail Akbar³, Septianis Afifah⁴

elisaputrianggraeni@gmail.com¹, romdonabduljapar@gmail.com²,
fadlanismai1206233@gmail.com³, septianisafipah1990@gmail.com⁴

Universitas Al-Ghifari

ABSTRAK

Pembangunan Southeastern Anatolia Project (GAP) oleh Turki merupakan mega-proyek infrastruktur pengelolaan air yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sosial-ekonomi domestik melalui irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Namun, intervensi hidrologis berskala besar ini memicu signifikansi geopolitik yang esensial di kawasan Timur Tengah, khususnya bagi negara-negara hilir (downstream riparian states) yakni Suriah dan Irak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan GAP terhadap penurunan debit air Sungai Eufrat serta implikasi hidropolitiknya terhadap stabilitas kawasan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research), tulisan ini dianalisis melalui kerangka konsep Keamanan Air (Water Security) dan Hidropolitik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa operasionalisasi bendungan-bendungan dalam proyek GAP, terutama Bendungan Atatürk, telah secara signifikan memotong volume aliran air Sungai Eufrat yang masuk ke Suriah dan Irak. Penurunan debit air ini tidak hanya memicu krisis agrikultur, degradasi ekologi, dan krisis air domestik di kedua negara tersebut, tetapi juga meningkatkan eskalasi ketegangan diplomatik trilateral. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menggarisbawahi urgensi pembentukan perjanjian diplomasi air (hydro-diplomacy) yang komprehensif dan mengikat secara hukum internasional guna menjamin distribusi sumber daya air yang adil (equitable utilization) dan mencegah konflik terbuka di masa depan.

Kata Kunci: Southeastern Anatolia Project (GAP), Sungai Eufrat, Hidropolitik, Keamanan Air, Konflik Timur Tengah.

ABSTRACT

Turkey's development of the Southeastern Anatolia Project (GAP) is a mega-water management infrastructure project aimed at enhancing domestic socio-economic development through irrigation and hydroelectric power generation. However, this large-scale hydrological intervention has significant geopolitical significance in the Middle East, particularly for downstream riparian states, namely Syria and Iraq. This study aims to analyze the impact of the GAP development on reducing the Euphrates River's water discharge and its hydropolitical implications for regional stability. Using a descriptive qualitative method with a library research approach, this paper is analyzed through the conceptual framework of Water Security and Hydropolitics. The research findings indicate that the operation of the GAP dams, particularly the Atatürk Dam, has significantly reduced the volume of Euphrates River water flowing into Syria and Iraq. This reduction in water discharge has not only triggered an agricultural crisis, ecological degradation, and a domestic water crisis in both countries but has also escalated trilateral diplomatic tensions. As a recommendation, this study underscores the urgency of establishing a comprehensive and legally binding international hydro-diplomacy agreement to ensure equitable utilization of water resources and prevent future open conflict.

Keywords: Southeastern Anatolia Project (GAP), Euphrates River, Hydropolitics, Water Security, Middle East Conflict.

PENDAHULUAN

Kawasan Timur Tengah secara geografis didominasi oleh iklim arid dan semi-arid, menjadikannya salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap kelangkaan sumber daya air di dunia. Dalam konstelasi politik kawasan ini, air bukan sekadar komoditas lingkungan dasar, melainkan instrumen vital yang mendefinisikan kelangsungan hidup negara dan keamanan nasional (water security). Salah satu urat nadi utama yang menopang peradaban dan stabilitas kawasan adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Eufrat, yang mengalir melintasi Turki, Suriah, dan Irak. Bagi Suriah dan Irak yang berposisi sebagai negara hilir (downstream riparian states), Sungai Eufrat memiliki urgensi yang absolut. Sumber daya air dari sungai ini menyuplai lebih dari separuh kebutuhan agrikultur, air minum domestik, dan pembangkit listrik di kedua negara tersebut (Gleick, 1993). Mengingat minimnya sumber daya air alternatif di wilayah tersebut, ketergantungan Suriah dan Irak terhadap aliran Eufrat menempatkan posisi geopolitik dan ekonomi mereka dalam kondisi yang sangat rentan terhadap segala bentuk perubahan debit air di wilayah hulu.

Keseimbangan hidrologis dan tatanan geopolitik di DAS Eufrat mulai mengalami pergeseran fundamental ketika Turki, sebagai negara hulu (upstream riparian state), menginisiasi Southeastern Anatolia Project (Güneydoğu Anadolu Projesi/GAP) pada dekade 1970-an. Proyek berskala raksasa ini merupakan agenda domestik ambisius Turki yang mencakup pembangunan 22 bendungan dan 19 pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di hulu Sungai Eufrat dan Tigris, dengan Bendungan Atatürk sebagai infrastruktur sentralnya. Secara domestik, GAP dirancang untuk mengakselerasi pembangunan sosial-ekonomi di wilayah tenggara Anatolia yang secara historis tertinggal, mengentaskan kemiskinan, serta mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan pangan nasional Turki melalui perluasan jaringan irigasi modern (Kibaroglu, 2014; Jongerden, 2010). Proyek ini dipandang oleh Ankara sebagai manifestasi kedaulatan mutlak atas sumber daya alam yang berada di dalam teritorialnya.

Namun, intervensi hidrologis berskala masif tersebut secara langsung menciptakan eksternalitas negatif yang mengancam stabilitas negara-negara tetangganya. Tahap awal operasionalisasi GAP, khususnya saat pengisian waduk Bendungan Atatürk pada awal 1990-an, mengakibatkan pemotongan drastis terhadap volume debit air Sungai Eufrat yang mengalir ke perbatasan Suriah dan bermuara di Irak (Daoudy, 2005). Berkurangnya pasokan air ini memicu krisis multidimensi di Suriah dan Irak, mulai dari gagal panen massal, ancaman ketahanan pangan, hingga terganggunya pasokan energi dari PLTA di negara-negara hilir. Ketimpangan penguasaan sumber daya ini pada akhirnya mengubah masalah ekologi menjadi sengketa hidropolitik (hydropolitics). Ketegangan diplomatik tereskalasi tajam seiring munculnya asimetri kekuasaan, di mana Turki secara de facto bertindak sebagai hegemon air (hydro-hegemon) yang mampu menggunakan kendalinya atas Eufrat sebagai instrumen geopolitik (Carkoglu & Eder, 2001). Perbedaan interpretasi mengenai hak kepemilikan dan pemanfaatan air internasional inilah yang hingga kini menjadikan isu Sungai Eufrat sebagai salah satu titik rawan konflik paling krusial di Timur Tengah.

Penelitian mengenai dinamika hidrologis dan politik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Eufrat-Tigris telah banyak dilakukan oleh para sarjana sebelumnya, namun mayoritas literatur masih terfragmentasi pada fokus analisis tertentu. Beberapa literatur awal dan klasik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gleick (1993) dan Biswas (1994), lebih

banyak berfokus pada analisis teknis-ekologis manajemen sumber daya air lintas batas serta kerangka dasar keamanan air secara global. Di sisi lain, kajian yang lebih spesifik mengenai Southeastern Anatolia Project (GAP) seringkali terjebak pada analisis kebijakan domestik. Misalnya, penelitian Kibaroglu (2014) dan Jongerden (2010) secara mendalam mengkaji motif pembangunan negara (state-building), modernisasi agrikultur, dan upaya asimilasi politik Turki terhadap populasi Kurdi di wilayah tenggara, menjadikan proyek GAP murni sebagai lensa politik internal Turki.

Lebih lanjut, literatur yang menyentuh aspek sengketa kawasan seperti kajian dari Carkoglu dan Eder (2001) cenderung menggunakan pendekatan ekonomi-politik institusional, sementara Daoudy (2005) menyoroti asimetri kekuatan negosiasi. Meskipun karya-karya tersebut memberikan landasan empiris yang kuat, masih terdapat kesenjangan literatur (gap literature) dalam menganalisis secara komprehensif bagaimana penurunan debit air secara kuantitatif langsung bertranslasi menjadi eskalasi ancaman eksistensial dan dilema keamanan (security dilemma) dalam relasi trilateral Turki, Suriah, dan Irak.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memisahkan antara dampak fisik bendungan dan dinamika geopolitik, tulisan ini secara sinergis mengintegrasikan dampak faktual operasionalisasi GAP (penurunan debit air) dengan implikasi hidropolitiknya menggunakan kerangka hydro-hegemony (Zeitoun & Warner, 2006). Melalui pendekatan ini, proyek GAP tidak sekadar diposisikan sebagai proyek infrastruktur domestik, melainkan dianalisis secara kritis sebagai instrumen hegemoni air yang secara aktif mendisrupsi arsitektur keamanan (water security) dan stabilitas politik negara-negara hilir.

Dalam menganalisis dampak pembangunan Southeastern Anatolia Project (GAP) dan eskalasi konflik di DAS Eufrat, penelitian ini menggunakan dua kerangka konseptual utama dalam studi Hubungan Internasional, yakni Keamanan Air (Water Security) serta Hidropolitik dan Hegemoni Air (Hydro-hegemony).

Berakhirnya Perang Dingin menandai pergeseran paradigma keamanan dalam studi Hubungan Internasional, dari keamanan tradisional yang berpusat pada militer dan negara (state-centric), menuju keamanan non-tradisional yang mencakup isu lingkungan dan kelangsungan hidup manusia (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dalam konteks ini, kelangkaan sumber daya air diangkat menjadi isu keamanan nasional (sekuritisasi). Menurut UN-Water (2013), Keamanan Air didefinisikan sebagai kapasitas suatu populasi untuk menjaga akses berkelanjutan terhadap air dalam jumlah dan kualitas yang memadai guna menopang kehidupan, pembangunan sosial-ekonomi, serta memastikan perlindungan dari polusi dan bencana terkait air.

Dalam studi konflik sumber daya, kelangkaan air tidak sekadar dipandang sebagai masalah ekologi, melainkan ancaman eksistensial. Gleick (1993) menegaskan bahwa ketika sumber daya air segar lintas batas (transboundary fresh water) mengalami penyusutan drastis akibat intervensi pihak lain, hal tersebut secara langsung merusak ketahanan pangan, ekonomi, dan stabilitas politik domestik negara yang terdampak. Bagi Suriah dan Irak, intervensi hidrologis Turki memicu kerentanan absolut, di mana penurunan debit Sungai Eufrat dipersepsikan bukan lagi sebagai isu manajemen sumber daya, melainkan invasi terhadap keamanan dan kelangsungan hidup negara.

Untuk membedah dimensi politik dari konflik ini, penelitian ini menggunakan kerangka Hidropolitik. Elhance (1999) mendefinisikan hidropolitik sebagai studi sistematis mengenai konflik dan kerja sama antarnegara terkait pengelolaan sumber daya

air internasional. Di dalam DAS lintas batas, posisi geografis secara alamiah menciptakan ketidaksetaraan.

Lebih spesifik, penelitian ini menggunakan Framework of Hydro-Hegemony (FHH) yang dikembangkan oleh Zeitoun dan Warner (2006). Teori ini menjelaskan bagaimana negara yang berada di hulu sungai (upstream state)—dalam hal ini Turki—menggunakan keunggulan geografis asimetrisnya untuk mendominasi negara-negara di hilir (downstream states), yaitu Suriah dan Irak. Hegemoni air tidak selalu dicapai melalui agresi militer, melainkan melalui eksploitasi kekuasaan struktural (structural power) dan posisi geografis untuk memaksakan dominasi kontrol atas air. Turki secara sepihak mampu membangun infrastruktur masif (proyek GAP) dan menentukan seberapa besar air yang boleh mengalir ke selatan tanpa persetujuan negara hilir. Praktik ini menciptakan situasi di mana Turki memegang bargaining chip (daya tawar) yang sangat kuat, memaksa Suriah dan Irak berada pada posisi inferior dalam setiap perundingan diplomasi, dan melanggengkan dominasi (hegemoni) Turki di kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai dinamika politik, relasi kekuasaan antarnegara, serta fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, yang tidak dapat direpresentasikan secara komprehensif semata-mata melalui angka statistik (Creswell, 2014). Sifat deskriptif analitis digunakan untuk memaparkan gambaran faktual mengenai kondisi penurunan debit air akibat operasionalisasi Southeastern Anatolia Project (GAP), yang kemudian dianalisis maknanya secara tajam melalui lensa Hubungan Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Southeastern Anatolia Project (GAP) yang diinisiasi oleh pemerintah Turki merupakan salah satu intervensi tata kelola air dan rekayasa hidrologis terbesar di dunia. Proyek ini mencakup area seluas 75.000 kilometer persegi di wilayah hilir Anatolia. Secara arsitektural, rancangan utama GAP menargetkan penyelesaian 22 bendungan utama dan 19 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Eufrat dan Tigris (Kolars & Mitchell, 1991).

Infrastruktur sentral yang menjadi tulang punggung dari proyek ini di Sungai Eufrat adalah Bendungan Atatürk (Atatürk Barajı). Selesai dibangun pada tahun 1990, bendungan ini merupakan bendungan terbesar keenam di dunia berdasarkan volume urugan. Bendungan Atatürk memiliki kapasitas waduk (reservoir) mencapai 48,7 miliar meter kubik air, sebuah kapasitas yang melampaui total aliran alami Sungai Eufrat selama satu tahun penuh (Kibaroglu, 2014). Skala penyimpanan air yang raksasa ini memberikan Turki kendali fisik secara mutlak untuk menahan, menyimpan, atau melepaskan aliran air ke negara-negara di bawahnya.

Sebelum masifnya pembangunan proyek GAP, Sungai Eufrat memiliki aliran alami rata-rata sekitar 30 hingga 32 miliar meter kubik per tahun di titik perbatasan Turki-Suriah. Namun, operasionalisasi GAP mengubah profil hidrologis ini secara drastis. Penurunan debit paling ekstrem tercatat pada periode awal 1990-an ketika Turki melakukan pengisian waduk Bendungan Atatürk. Selama kurang lebih satu bulan pada awal 1990, Turki secara sepihak memutus hampir 100% aliran Sungai Eufrat yang menuju

ke selatan, memicu kepanikan massal di Suriah dan Irak (Daoudy, 2005).

Pasca-pengisian bendungan, melalui Protokol Bilateral 1987 yang bersifat sementara, Turki berkomitmen untuk melepaskan air sejumlah 500 meter kubik per detik (sekitar 15,75 miliar meter kubik per tahun) ke perbatasan Suriah. Dari kuota tersebut, berdasarkan kesepakatan Suriah-Irak tahun 1989, Suriah menahan 42% dan mengalirkan sisa 58% (sekitar 9 miliar meter kubik per tahun) ke perbatasan Irak (FAO, 2009). Data komparatif ini menunjukkan bahwa operasionalisasi GAP telah memotong lebih dari 50% volume aliran historis alami Sungai Eufrat sebelum mencapai wilayah Suriah, dan menyusut hingga kurang dari sepertiganya saat memasuki perbatasan Irak (Al-Ansari, 2013).

Krisis di Suriah Penurunan drastis debit air Eufrat memberikan pukulan telak bagi kawasan timur laut Suriah, khususnya di wilayah Al-Jazira (seperti kegubernuran Raqqqa, Deir ez-Zor, dan Al-Hasakah) yang secara tradisional berfungsi sebagai "lumbung pangan" (breadbasket) negara. Penyusutan air irigasi, yang diperparah oleh siklus kemarau, memicu gagal panen gandum dan kapas secara masif. Berkurangnya kapasitas Bendungan Tabqa (bendungan utama Suriah di Sungai Eufrat) juga menyebabkan defisit pasokan listrik domestik dan krisis air minum bersih bagi jutaan penduduk (Kelley et al., 2015). Kegagalan sektor agrikultur ini pada akhirnya memaksa ratusan ribu hingga jutaan petani dan penggembala melakukan eksodus (migrasi internal) dari desa ke kawasan pinggiran kota besar di Suriah pada akhir 2000-an.

Krisis di Irak Sebagai negara paling ujung hilir (downstream), Irak menanggung dampak akumulatif terberat. Selain volume air yang berkurang drastis, kualitas air yang tiba di Irak juga memburuk drastis karena telah terkontaminasi oleh limbah pupuk pertanian (salinisasi) dari proyek irigasi Turki dan Suriah. Penurunan tinggi muka air menyebabkan bendungan-bendungan hidroelektrik Irak, seperti Bendungan Haditha, tidak dapat beroperasi pada kapasitas optimalnya. Lebih jauh lagi, krisis air Eufrat (bersama dengan Tigris) secara perlahan mematikan ekosistem Rawa Mesopotamia (Mesopotamian Marshes / Al-Ahwar) di Irak selatan. Keringnya rawa-rawa ini menghancurkan mata pencaharian tradisional suku Arab Rawa (Marsh Arabs) yang bergantung pada penangkapan ikan dan peternakan kerbau, sekaligus memicu krisis ketahanan pangan di tingkat nasional (Al-Ansari, 2013)

Dinamika hidropolitik di Daerah Aliran Sungai (DAS) Eufrat tidak sekadar dipicu oleh berkurangnya volume air secara fisik, melainkan berakar secara fundamental pada benturan doktrin kedaulatan negara. Sengketa antara Turki, Suriah, dan Irak merepresentasikan perselisihan klasik dalam hukum perairan internasional mengenai hak kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam lintas batas, yakni benturan antara doktrin Absolute Territorial Sovereignty dan Absolute Territorial Integrity.

Sebagai negara hulu (upstream state), Turki secara diplomatis dan legal berlandung di balik prinsip Absolute Territorial Sovereignty (Kedaulatan Teritorial Mutlak), yang dalam literatur hukum internasional sering diidentikkan dengan Doktrin Harmon (Harmon Doctrine). Berdasarkan prinsip ini, Turki mengklaim hak eksklusif, absolut, dan tak dapat diganggu gugat untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang berada di dalam batas yurisdiksinya (McCaffrey, 2001). Dalam berbagai forum internasional, Ankara secara konsisten menolak untuk mengklasifikasikan Sungai Eufrat sebagai "sungai internasional" (international waters), melainkan menggunakan terminologi "perairan lintas batas" (transboundary waters). Dengan konstruksi logika politik ini, Turki menyamakan air di

hulu Eufrat dengan komoditas sumber daya alam lainnya—seperti minyak bumi bagi negara-negara Arab yang tunduk sepenuhnya pada kedaulatan nasional (Kibaroglu, 2014). Turki berargumen bahwa proyek GAP adalah hak kedaulatan domestiknya dan menolak segala bentuk campur tangan asing dalam pembagian kuota air, meski mereka tetap menyatakan komitmen sepihak terhadap "pemanfaatan yang wajar" (equitable utilization) semata-mata berdasarkan itikad baik.

Di sisi yang berseberangan, Suriah dan Irak sebagai negara hilir (downstream states) berpegang teguh pada doktrin Absolute Territorial Integrity (Integritas Teritorial Mutlak). Doktrin ini menegaskan bahwa negara-negara yang berada di bagian hilir sungai memiliki hak mutlak untuk menerima aliran sungai alami tanpa adanya pengurangan volume atau kerusakan kualitas oleh intervensi negara hulu (Daoudy, 2005). Bagi Damaskus dan Baghdad, Sungai Eufrat adalah "perairan internasional" yang kepemilikannya bersifat komunal dan pengelolaannya harus tunduk pada kesepakatan bersama antar-negara (shared resources).

Lebih lanjut, Suriah dan Irak memperkuat posisi tawar mereka dengan menggunakan argumen "hak historis yang diperoleh" (prior appropriation / acquired rights). Mereka menekankan bahwa populasi di wilayah bulan sabit subur (fertile crescent) Mesopotamia telah bergantung pada aliran Sungai Eufrat untuk pertanian dan kelangsungan peradaban selama ribuan tahun, jauh sebelum Republik Turki modern didirikan (Lowi, 1993). Oleh karena itu, operasionalisasi bendungan raksasa seperti Bendungan Atatürk dianggap bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah bentuk agresi hidrologis yang melanggar hak historis dan mengancam integritas teritorial mereka.

Benturan ontologis mengenai status air ini menciptakan kebuntuan diplomasi yang akut. Selama Turki memandang Eufrat sebagai properti teritorial berdaulat, sementara Suriah dan Irak menuntutnya sebagai hak komunal yang tidak boleh diganggu gugat, maka sengketa ini akan terus terjebak dalam jebakan zero-sum game di mana tidak ada kompromi yang dapat mengikat secara hukum internasional.

Dalam menganalisis kebuntuan diplomasi air di DAS Eufrat, tidak mungkin mengabaikan realitas ketimpangan kekuatan (asymmetry of power) di antara negara-negara riparian. Merujuk pada kerangka teori Hydro-Hegemony yang dikembangkan oleh Zeitoun dan Warner (2006), hegemoni air terbentuk ketika sebuah negara mampu memonopoli kontrol atas sumber daya air lintas batas melalui eksploitasi kekuasaan secara geografis, material, dan struktural. Dalam konteks ini, posisi geografis Turki di hulu sungai (upstream) memberikannya keunggulan alamiah yang absolut. Turki mengendalikan lebih dari 88% potensi aliran air Sungai Eufrat sebelum sungai tersebut melintasi perbatasan selatan (Daoudy, 2005). Keunggulan letak geografis ini secara efektif dikonversi oleh Ankara menjadi kekuasaan struktural (hegemoni), yang menempatkan Suriah dan Irak pada posisi inferior dalam arsitektur politik kawasan.

Sebagai hegemon air, Turki secara aktif mendayagunakan keunggulan geografis dan infrastrukturnya (seperti Bendungan Atatürk) tidak sekadar untuk pembangunan domestik, melainkan sebagai instrumen geopolitik atau bargaining chip (alat tawar-menawar) yang koersif terhadap negara tetangganya. Praktik ini sangat terlihat dalam strategi issue-linkage (pengaitan isu) yang diterapkan oleh Turki. Alih-alih memisahkan urusan air dari isu keamanan nasional lainnya, Turki menggunakan kendali atas Sungai Eufrat untuk menekan Suriah agar mematuhi agenda politik Ankara. Secara historis, hal ini terlihat jelas pada dekade 1980-an dan 1990-an ketika Turki mengaitkan kesediaannya untuk

mengalirkan air ke Suriah dengan tuntutan agar Damaskus menghentikan dukungan logistik dan tempat perlindungan bagi kelompok separatis Kurdi (PKK) di wilayah Suriah utara (Warner, 2008).

Protokol 1987 antara Turki dan Suriah merupakan manifestasi paling nyata dari praktik hydro-hegemony ini. Dalam protokol tersebut, Turki bersedia menjamin aliran minimum 500 meter kubik per detik kepada Suriah, namun dengan konsesi politik yang implisit maupun eksplisit bahwa Suriah harus menjamin keamanan perbatasan dan bekerja sama dalam pemberantasan kelompok bersenjata yang dianggap sebagai ancaman oleh Turki (Daoudy, 2009). Ketika ketegangan memuncak, ancaman pemutusan air oleh Turki (baik secara terbuka maupun terselubung melalui alasan teknis perbaikan bendungan) selalu berhasil menjadi instrumen penekan yang efektif.

Lebih jauh lagi, asimetri kekuatan ini semakin menganga seiring berjalannya waktu. Turki memiliki keunggulan kapabilitas militer, stabilitas politik domestik, serta kekuatan ekonomi yang jauh lebih superior dibandingkan Suriah dan Irak. Di sisi lain, instabilitas politik, konflik sektarian, serta perang saudara yang berkepanjangan di Suriah dan Irak telah melumpuhkan kapasitas diplomatik kedua negara tersebut untuk membentuk koalisi penyeimbang (counter-hegemony). Akibatnya, Suriah dan Irak tidak memiliki instrumen negosiasi yang sepadan untuk melawan dominasi Turki. Posisi yang asimetris ini memastikan bahwa tata kelola perairan Sungai Eufrat akan terus didikte oleh kepentingan sepihak sang hegemon air, meninggalkan negara-negara hilir dalam kondisi dilema keamanan yang permanen tanpa ruang negosiasi yang setara.

Kegagalan diplomasi trilateral antara Turki, Suriah, dan Irak bersumber pada persepsi bahwa alokasi sumber daya air di DAS Eufrat merupakan sebuah zero-sum game—suatu kondisi di mana keuntungan kuantitatif yang diraih oleh satu pihak (Turki) secara matematis merupakan kerugian absolut bagi pihak lain (Suriah dan Irak). Ketiadaan rezim institusi internasional yang kuat di kawasan tersebut menyebabkan negosiasi pembagian air selalu berujung pada kebuntuan (deadlock). Upaya pembentukan wadah negosiasi seperti Joint Technical Committee (JTC) pada dekade 1980-an gagal menghasilkan kesepakatan permanen karena Turki menolak tuntutan Suriah dan Irak untuk menetapkan kuota air secara matematis berdasarkan "kebutuhan masa lalu", serta menolak pelibatan lembaga mediasi internasional yang mengikat (Kibaroglu, 2014).

Menghadapi superioritas militer dan diplomasi Turki, Suriah yang berada pada posisi inferior menyadari bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk menekan Ankara secara konvensional. Sebagai respons balasan (counter-measure), Damaskus menerapkan strategi peperangan asimetris melalui kebijakan issue-linkage. Suriah secara aktif membiarkan, bahkan memfasilitasi, kelompok separatis bersenjata Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)—termasuk memberikan suaka politik bagi pemimpinnya, Abdullah Öcalan, di Damaskus—sebagai alat tawar-menawar (bargaining chip) untuk memaksa Turki mengembalikan kuota aliran Sungai Eufrat (Daoudy, 2005). Bagi rezim Suriah, dukungan terhadap kelompok milisi yang merongrong keamanan domestik Turki di wilayah tenggara merupakan satu-satunya instrumen penekan yang efektif untuk membalas tindakan Turki yang memotong "urat nadi" agrikultur Suriah.

Eskalasi dari strategi saling sandera ini membawa kedua negara ke ambang perang terbuka pada akhir tahun 1998. Merasa keamanan nasionalnya terancam secara eksistensial oleh taktik proksi Suriah, Turki memobilisasi pasukan militernya di sepanjang perbatasan selatan dan mengancam akan melakukan invasi militer jika Damaskus tidak

segera mengusir Öcalan dan menghentikannya terhadap PKK (Altunışık & Tür, 2006). Menghadapi ancaman kekuatan bersenjata konvensional yang jauh lebih besar, Suriah terpaksa mundur. Krisis ini berujung pada penandatanganan Perjanjian Adana (Adana Agreement) pada Oktober 1998, di mana Suriah menghentikan semua dukungan kepada PKK.

Kapitulasi Suriah dalam Perjanjian Adana menegaskan kemenangan absolut hydro-hegemony Turki. Hilangnya "kartu as" politik Suriah berupa dukungan proksi PKK membuat Damaskus dan Baghdad kehilangan instrumen negosiasi apa pun di meja diplomasi air. Pasca-1998, dinamika trilateral ini semakin membeku. Irak yang hancur pasca-Perang Teluk dan invasi AS, serta Suriah yang kemudian terjerumus ke dalam perang saudara panjang sejak 2011, menjadikan kedua negara hilir tersebut failed states yang kehilangan kapasitas diplomasi luar negerinya. Akibatnya, negosiasi yang adil tidak pernah terealisasi. Turki secara definitif memenangkan zero-sum game ini dan terus melanjutkan operasionalisasi proyek GAP tanpa hambatan berarti dari hukum maupun diplomasi internasional, membiarkan ancaman krisis air di negara-negara hilir menjadi bom waktu geopolitik yang permanen.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan Southeastern Anatolia Project (GAP) oleh Turki telah memicu disrupsi hidrologis dan geopolitik yang masif di kawasan Timur Tengah. Secara objektif, operasionalisasi mega-proyek ini, khususnya pengisian Bendungan Atatürk, terbukti telah memotong volume debit air alami Sungai Eufrat secara drastis sebelum mencapai negara-negara hilir. Penurunan suplai air ini bertransformasi menjadi ancaman eksistensial terhadap keamanan air (water security) di Suriah dan Irak, yang ditandai dengan hancurnya sektor agrikultur, krisis pasokan air bersih domestik, penyusutan kapasitas energi hidroelektrik, serta degradasi ekologi yang parah.

Lebih dari sekadar krisis ekologis, intervensi tata kelola air ini telah melahirkan sengketa hidropolitik yang kompleks. Dinamika konflik trilateral ini didorong oleh asimetri kekuatan dan praktik hydro-hegemony yang dijalankan oleh Turki. Dengan berlandung di balik doktrin Kedaulatan Teritorial Mutlak (Absolute Territorial Sovereignty), Turki memonopoli kontrol atas Sungai Eufrat dan menggunakan air sebagai instrumen tekanan (bargaining chip) politik. Ketiadaan kompromi ini menciptakan situasi zero-sum game, yang memicu eskalasi diplomatik dan bahkan mendorong negara hilir seperti Suriah untuk menggunakan taktik peperangan proksi asimetris. Pada akhirnya, krisis di DAS Eufrat membuktikan bahwa ketimpangan penguasaan atas sumber daya air lintas batas tanpa adanya regulasi yang mengikat dapat menjadi katalisator bagi instabilitas keamanan kawasan secara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ansari, N. (2013). Management of Water Resources in Iraq: Perspectives and Prognoses. *Engineering*, 5(8), 667-684.
- Altunışık, M. B., & Tür, Ö. (2006). From Distant Neighbors to Partners? Changing Syrian-Turkish Relations. *Security Dialogue*, 37(2), 229-248.
- Biswas, A. K. (1994). Management of International Water Resources: Some Recent Developments. *International Journal of Water Resources Development*, 10(2), 167-181.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder,

- CO: Lynne Rienner Publishers.
- Carkoglu, A., & Eder, M. (2001). Domestic Concerns and the Water Conflict in the Euphrates-Tigris River Basin. *Middle Eastern Studies*, 37(1), 41-71.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Daoudy, M. (2005). The Water Divide between Syria, Turkey and Iraq: Negotiation, Security and Power Asymmetry. CNRS Editions.
- Daoudy, M. (2009). Asymmetric Power: Negotiating Water in the Euphrates and Tigris. *International Negotiation*, 14(2), 361-391.
- Elhance, A. P. (1999). *Hydropolitics in the 3rd World: Conflict and Cooperation in International River Basins*. Washington, D.C.: US Institute of Peace Press.
- FAO (Food and Agriculture Organization). (2009). *Irrigation in the Middle East region in figures: AQUASTAT Survey – 2008*. Rome: FAO Water Reports.
- Gleick, P. H. (1993). Water and Conflict: Fresh Water Resources and International Security. *International Security*, 18(1), 79-112.
- Jongerden, J. (2010). Dams and Politics in Turkey: Utilizing Water, Developing Conflict. *Middle East Policy*, 17(1), 137-143.
- Kelley, C. P., Mohtadi, S., Cane, M. A., Seager, R., & Kushnir, Y. (2015). Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 112(11), 3241-3246.
- Kibaroglu, A. (2014). State-building and water in the Middle East: Turkey's hydro-politics. *Water International*, 39(7), 875-889.
- Kolars, J. F., & Mitchell, W. A. (1991). *The Euphrates River and the Southeast Anatolia Development Project*. Carbondale: Southern Illinois University Press.
- Lowi, M. R. (1993). *Water and Power: The Politics of a Scarce Resource in the Jordan River Basin*. Cambridge University Press.
- McCaffrey, S. C. (2001). *The Law of International Watercourses* (2nd ed.). Oxford University Press.
- UN-Water. (2013). *Water Security and the Global Water Agenda: A UN-Water Analytical Brief*. United Nations University.
- Warner, J. (2008). Contested Hydrohegemony: Hydraulic Control and Security in Turkey. *Water Alternatives*, 1(2), 271-288.
- Zeitoun, M., & Warner, J. (2006). Hydro-hegemony – a framework for analysis of trans-boundary water conflicts. *Water Policy*, 8(5), 435-460.